

PARIWISATA INDONESIA DI MASA *NEW IMPERIALISM* ATAU IMPERIALISME MODERN: SEBUAH KRITIK DAN REFLEKSI TERHADAP PERENCANAAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI BOROBUDUR DAN MANDALIKA

S.S.Aulia

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer
Universitas Komputer Indonesia, Jalan Dipati Ukur No. 102-116 Bandung 40132
email: selfaseptianiaulia1@gmail.com

ABSTRAK

Pariwisata merupakan sektor unggulan yang memberikan kontribusi cukup tinggi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di berbagai negara pada saat ini. Meningkatnya destinasi dan investasi pariwisata menjadikan pariwisata sebagai faktor kunci dalam pendapatan ekspor, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan usaha dan infrastruktur. Pariwisata telah mengalami ekspansi dan diversifikasi berkelanjutan, sehingga menjadi salah satu sektor ekonomi yang terbesar dan tercepat pertumbuhannya di dunia (UNWTO, 2016). Tidak terkecuali Indonesia, saat ini juga Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan perencanaan pengembangan pariwisata. Akan tetapi, perencanaan pengembangan pariwisata pun tidak hanya memberikan dampak positif saja, karena banyak juga dampak-dampak negatif yang dihasilkan dari perencanaan pengembangan pariwisata, terutama di masa *new-imperialism* atau imperialisme modern. Seperti munculnya kebocoran aliran uang yang dihasilkan dari kegiatan wisata ke negara-negara pemberi modal yang menandai dampak negatif pariwisata di masa *new-imperialism* atau imperialisme modern. Sehingga hal ini mengakibatkan dilema untuk para perencana di Indonesia dalam merencanakan pengembangan pariwisata.

Kata Kunci : Pengembangan Pariwisata, *New Imperialism*, dilema perencanaan

I. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor unggulan yang memberikan kontribusi cukup tinggi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di berbagai negara pada saat ini. Meningkatnya destinasi dan investasi pariwisata menjadikan pariwisata sebagai faktor kunci dalam pendapatan ekspor, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan usaha dan infrastruktur. Pariwisata telah mengalami ekspansi dan diversifikasi berkelanjutan, sehingga menjadi salah satu sektor ekonomi yang terbesar dan tercepat pertumbuhannya di dunia (UNWTO, 2016). Meskipun krisis global telah terjadi beberapa kali, akan tetapi perjalanan wisatawan internasional tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif, yaitu 674 juta wisatawan pada tahun 2000 dan pada tahun 2015 meningkat jumlahnya menjadi 1,1 miliar wisatawan. Sehingga penerimaan yang dihasilkan dari perjalanan wisatawan internasional di seluruh dunia juga meningkat, yang pada tahun 2000 sebesar 495 miliar dollar menjadi 1260 miliar dollar pada tahun 2015. Pada tahun 2015, wisatawan internasional merepresentasikan 7 persen dari ekspor perdagangan dan jasa, dan ini meningkat setelah pada tahun 2014 ekspor sebesar 6 persen (UNWTO, 2016).

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak potensi pariwisata, terutama wisata alam dan wisata budaya. Pada tahun 2014, kontribusi pariwisata terhadap PDB Indonesia yaitu 9 persen atau sebesar Rp. 946,09 triliun serta menghasilkan devisa sebesar Rp. 140 triliun. Selain itu, kontribusi sektor pariwisata terhadap peningkatan kesempatan kerja untuk masyarakat Indonesia pada tahun 2014 juga mencapai 11 persen. Sehingga, pada saat ini pariwisata ditetapkan sebagai salah satu sektor prioritas nasional yang sedang dikembangkan. Hal ini berimplikasi pada kebijakan Pemerintah yang telah menargetkan untuk membuat sektor pariwisata berkontribusi sebesar 15 persen dan menghasilkan devisa sebesar Rp. 280 triliun serta dapat menyerap tenaga kerja sebesar 13 juta orang pada tahun 2019. Akan tetapi, berdasarkan *Travel & Tourism Competitiveness Report* dari *World Economic Forum* yang mengukur perkembangan berkelanjutan dari sektor travel dan wisata yang pada akhirnya berdampak pada daya saing sebuah negara, menyatakan bahwa Indonesia pada tahun 2015 berada di peringkat 50 dalam hal daya saing dibidang pariwisata. Peringkat tersebut masih jauh jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura yang berada pada peringkat 11, Malaysia pada peringkat 25 dan Thailand pada peringkat 35.

Penyebab Indonesia berada pada peringkat 50 adalah karena faktor kurangnya ketersediaan infrastruktur dasar (jaringan air bersih, telekomunikasi, transportasi) dan infrastruktur penunjang kegiatan pariwisata (hotel, tempat rental kendaraan, ATM), serta masih belum berlanjutnya kegiatan pariwisata secara lingkungan. Hal ini tentu saja akan menghambat pengembangan pariwisata di Indonesia. Maka, pada saat ini Pemerintah sedang gencar-gencarnya mencari investasi baik investasi dalam maupun luar negeri untuk melakukan pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang, seperti hotel-hotel berbintang yang akan mendukung pengembangan kegiatan pariwisata di Indonesia.

Terkait dengan *new-imperialism* atau imperialisme modern dibidang pariwisata, saat ini imperialisme modern berperan sebagai investor penyedia modal/ dana dari negara-negara maju ke negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini diperkuat dengan adanya pernyataan dari Lenin (1917) dalam Loomba (2005) bahwa '*Imperialism, the Highest Stage of Capitalism*' yang menyatakan bahwa industri di negara Eropa telah menghasilkan modal yang besar dan tidak dapat diinvestasikan lagi di negara asalnya karena terbatasnya buruh. Sedangkan negara-negara koloni tidak memiliki modal, akan tetapi memiliki banyak buruh dan sumberdaya alam. Sehingga negara-negara maju tersebut menginvestasikan modalnya ke negara-negara koloni agar dapat mempertahankan pertumbuhan ekonominya sendiri. Ini berarti walaupun menginvestasikan modal di negara-negara koloni, tetapi aliran uang yang dihasilkan akan kembali lagi ke negara pemilik modal. Pada akhirnya, ketika dunia telah diserap oleh para kapitalis negara maju, maka sistem global itu disebut dengan "imperialisme" (Loomba, 1998).

Hal ini berakibat pada bergantungnya Indonesia terhadap investasi asing dalam mengembangkan sektor pariwisatanya. Modal-modal asing yang dapat berbentuk infrastruktur dan fasilitas penunjang pariwisata seperti hotel, restoran, bar, café tersebut dapat berdampak negatif terhadap masyarakat lokal sebagai orang-orang yang tinggal di sekitar kawasan destinasi wisata. Salah satu dampak negatif sosial-

ekonomi yang terjadi adalah kecilnya produk lokal yang digunakan oleh wisatawan asing karena semua fasilitas kegiatan wisata diimpor dari negara asal wisatawan. Sehingga hal ini mengakibatkan kebocoran ekonomi (*economic leakage*) yang begitu besar, terutama pada *resort-resort* tertutup (*enclave resort*) yang didominasi oleh modal asing. Mengalirnya manfaat ekonomi dari negara berkembang ke negara maju ini mempunyai pola yang sama dengan berbagai perusahaan multinasional pada sektor lainnya, yang berkembang sejak industrialisasi dan modernisasi dunia ketiga (Pitana, 2004). Hal ini diperkuat dengan adanya pernyataan bahwa peranan pariwisata sebagai paspor untuk pembangunan harus dikaji ulang, karena justru memunculkan kolonialisme baru melalui pariwisata. Negara-negara yang menjadikan pariwisata sebagai andalan akhirnya terjerat dalam ketergantungan (*dependency*) yang begitu mencekik leher (Brohnan 1996 dalam Pitana, 2004). Walaupun begitu, menurut Pitana (2004), hampir beberapa literatur dan kajian studi menunjukkan bahwa banyak juga dampak positif yang diberikan oleh kegiatan pariwisata, seperti peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan peeriman devisa, peningkatan kesempatan kerja dan peluang usaha, peningkatan pendapatan pemerintah dari pajak, dan lain-lain. Selain itu, pariwisata juga dianggap mampu menghasilkan angka pengganda (*multiplier effect*) yang tinggi melebihi angka pengganda pada berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Selain dampak sosial-ekonomi, kegiatan pariwisata juga dianggap berdampak negatif pada kegiatan sosial-budaya. Hal ini disebabkan dengan banyaknya wisatawan luar negeri yang datang, maka dapat mempengaruhi kondisi sosial-budaya masyarakat lokal. Masyarakat lokal akan kehilangan identitas lokalnya seiring dengan melemahnya modal sosial yang dimiliki. Sehingga masyarakat lokal sudah terbiasa dengan budaya wisatawan asing yang pada akhirnya terintegrasi dalam kehidupannya. Hal tersebut disebut sebagai proses ‘turistikasi’ (Michael Picard 1993; 1996 dalam Pitana, 2004). Selain itu, konsekuensi yang dibawa oleh pariwisata bukan saja terbatas pada hubungan *host-guest*. Pengaruh di luar interaksi langsung ini justru lebih penting, karena mampu menyebabkan restrukturisasi pada berbagai bentuk hubungan didalam masyarakat (Wood, 1984 dalam Pitana, 2004). Pariwisata juga telah mengubah struktur internal dari masyarakat, sehingga terjadi perbedaan antara masyarakat yang memiliki hubungan dengan pariwisata dengan yang tidak. Lebih lanjut lagi, pariwisata mempunyai sifat kolonialistik yang merebut independensi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Pariwisata pun memberikan dampak sosial-ekonomi pada satu sisi, tapi sisi lainnya membawa ketimpangan dan ketergantungan sosial, atau memperparah ketimpangan yang telah ada. Namun, ada juga yang memandang bahwa kebudayaan selalu beradaptasi, termasuk dalam menghadapi pariwisata. Sehingga akulturasi merupakan proses yang wajar dalam setiap pertemuan antar budaya. Akan tetapi, proses tersebut tidak berarti bahwa makna otentisitas otomatis akan hilang. Namun demikian, komoditisasi dari berbagai aspek keagamaan yang memunculkan konflik karena pariwisata pun ada. Hal ini karena terdapat adanya perubahan fungsi kebudayaan yang dipandang sebagai sumberdaya komersial, sehingga berbagai aspek kebudayaan lokal, kesenian maupun kerajinan dapat mengalami revitalisasi akibat adanya pariwisata (Pitana, 2004). Sedangkan Sharpley (1994) dalam Pitana (2004) melihat bahwa pariwisata merangsang munculnya komunikasi yang lebih intensif didalam masyarakat lokal. Masyarakat dapat memanfaatkan peluang yang diberikan oleh pariwisata, dan manfaat ekonomi pariwisata dapat digunakan dalam kegiatan pelestarian budaya, dan secara nyata pariwisata memberikan kontribusi yang nyata dalam pelestarian bangunan-bangunan bersejarah atau keagamaan. Hal-hal tersebut menjadi dilema untuk perencana, karena satu sisi pariwisata memberikan dampak positif, tapi disisi yang lain juga dapat memberikan dampak negatif. Selain itu, hal tersebut juga menjadi bahan kritik bagi Pemerintah sebagai pengambil keputusan agar jangan sampai rencana awalnya pariwisata merupakan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, akan tetapi faktanya di lapangan justru kegiatan pariwisata tersebut menyengsarakan masyarakat lokal. Sehingga penting untuk perencana dan pemerintah selaku pembuat kebijakan, untuk mengetahui bagaimana dapat meningkatkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif dari kegiatan pariwisata yang akan dikembangkan. Mengambil dua lokasi studi, yaitu Borobudur dan Mandalika karena kedua lokasi tersebut memiliki karakteristik wisata yang berbeda dalam perkembangannya. Borobudur dan Mandalika merupakan salah satu dari sepuluh destinasi wisata prioritas nasional yang sedang dikembangkan pada tahun 2016. Borobudur merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)

dengan produk wisatanya berupa wisata budaya dan sejarah. Sedangkan Mandalika merupakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan produk wisatanya berupa wisata alam (bahari). Maka, artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana perkembangan pariwisata beserta dampaknya terhadap sosial-ekonomi juga sosial-budaya terhadap masyarakat lokal di wilayah sekitar destinasi wisata serta mengidentifikasi bagaimana peran perencana dalam mengembangkan pariwisata pada masa *new-imperialisme* atau *imperialisme modern* ini berdasarkan dua kasus studi, yaitu Borobudur dan Mandalika. Adapun sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam rangka mencapai tujuan dalam artikel ini yaitu:

1. Mengidentifikasi perkembangan pariwisata beserta dampak sosial ekonomi juga sosial-budaya terhadap masyarakat lokal di wilayah sekitar destinasi wisata pada masa *new imperialism/imperialisme modern*
2. Mengidentifikasi peran perencana dalam mengembangkan pariwisata pada masa *new imperialism/imperialisme modern*

A. Imperialisme Modern Dalam Pariwisata Serta Kaitannya Dalam Perencanaan

Studi mengenai imperialisme sejauh ini telah banyak dilakukan pada awal abad 20-an. Salah satu studi mengenai imperialisme berdasarkan Hobson (1902) dalam Sinclair-Maragh and Dogan Gursoy (2004), yang menganalisis perbedaan bentuk dalam imperialisme. Dalam studinya, imperialisme dikonsepkan sebagai sebuah cara pandang ekonomi yang asalnya berkaitan pada masyarakat kapitalis yang mendistribusikan secara tidak adil kesejahteraan yang telah dibuat untuk memperluas pasar dalam rangka untuk meningkatkan keuntungan. Pariwisata juga merupakan salah satu bentuk dari imperialisme. Hal tersebut karena pariwisata menarik investasi dari organisasi internasional masuk ke negara-negara berkembang untuk memfasilitasi pembangunan. Hal ini secara konsekuensi menghasilkan dominasi kekuatan antara negara-negara pusat dan pinggiran (Sinclair-Maragh dan Dogan Gursoy, 2004).

B. Konseptualisasi Imperialisme Modern Dalam Pariwisata

Dalam menganalisis imperialisme, Webster (1990) membandingkan konseptualisasi imperialisme yang dikemukakan oleh Vladimir I Lenin dan Karl Marx yang melihat kapitalisme pada pertumbuhan internasional yang berfokus pada menipisnya sumber daya dari negara-negara berkembang. Sedangkan Perspektif Marxisme menganalisis imperialisme dalam kerangka kapitalisme dan perubahan sosial. Pandangan Lenin ini mendukung perspektif Marxist terhadap imperialisme. Sehingga, secara keseluruhan, teori Marxist-Lenin mengonsepkan imperialisme sebagai suatu hubungan ekonomi dibawah kapitalisme privat yang dimotivasi oleh kebutuhan untuk memperluas pasar. Kemudian Galtung (1971) memperluas perspektif tersebut kedalam teori struktural dalam imperialisme yang mendefinisikan imperialisme sebagai sebuah jenis dominasi hubungan kolektif yang mengambil tempat secara dominan diantara berbagai negara. Hubungan imperialis didirikan secara khusus untuk menguntungkan partai yang mendominasi, maka imperialisme adalah tentang hubungan dominasi dan kekuasaan. Dengan demikian, perusahaan multinasional dari negara-negara inti mempertahankan dominasi keuangan mereka dengan memiliki kontrol pada sumber negara-negara termiskin di dunia. Menurut Shen (2011) dalam Sinclair-Maragh and Dogan Gursoy (2004), sebagai sebuah sistem, imperialisme juga berkaitan pada indikasi kepentingan harmoni atau disharmoni. Dalam sebuah paradigma disharmoni, terdapat adanya kepentingan yang bertentangan antara investor asing dengan negara tuan rumah. Salah satunya adalah bahwa keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan asing diwujudkan dengan mengorbankan mayoritas penduduk dan ini dapat mengakibatkan kesengsaraan. Li dan Chen (1997) dalam Sinclair-Maragh and Dogan Gursoy (2004) menyatakan bahwa kedua belah pihak memiliki harapan yang berbeda dari investasi. Tujuan dari perusahaan asing adalah untuk mendapatkan keuntungan dan negara tuan rumah adalah untuk menyerap modal dan teknologi yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi.

Teori imperialisme, *empire*, dan global kapitalisme kontemporer dapat dikategorikan sebagai sebuah rangkaian kesatuan yang menjelaskan tingkat kebaruan dalam imperialisme (Fuch, 2010). *New imperialism* saat ini berbeda dengan *fordist capitalism* yang memiliki karakteristik mengatur perekonomian, dekolonialisasi formal, serta memunculkan sebuah sistem produksi dan konsumsi massal.

Akan tetapi, *new imperialism* saat ini memiliki bentuk baru sebagai *finance capital*/ modal keuangan melalui perusahaan-perusahaan transnasional seperti perusahaan asuransi, dana-dana pensiun, dana-dana investasi dan instrumen-instrumen finansial baru lainnya yang memainkan peran penting pada deregulasi serta pasar keuangan yang lincah. Contohnya adalah krisis ekonomi dunia pada tahun 2008 yang diakibatkan dari adanya spekulasi keuangan pada pasar properti di Amerika. Perusahaan-perusahaan *finance* ini berperan penting dalam membentuk konsentrasi modal dibidang jasa, industri juga *finance*. Sehingga, perusahaan-perusahaan ini akan mendapatkan keuntungan melalui akumulasi kapital dari produksi ekonomi yang dihasilkan. Maka dapat dikatakan bahwa kapitalisme kontemporer saat ini merupakan sebuah jenis baru dari imperialisme. Kemudian, bentuk baru lainnya sebagai fenomena *new imperialism* saat ini adalah revolusi teknologi terutama dibidang informasi dan komunikasi serta konflik militer yang membentuk grup militer transnasional seperti Al-Qaeda.

Terdapat tiga bentuk dari imperialisme, yaitu politik, ekonomi dan budaya. Ketiga dimensi dari imperialisme ini akan dijelaskan dengan mengaitkannya kedalam konteks pengembangan pariwisata Indonesia.

C. Political Imperialism

Political imperialism terjadi ketika model pengambilan keputusan untuk pembangunan dibuat oleh organisasi dari negara-negara yang menjadi inti kemudian diikuti oleh negara-negara pinggirannya. Hal tersebut terjadi karena besarnya investasi asing yang diberikan dalam pengembangan pariwisata sehingga masyarakat lokal tidak dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan pariwisata di daerahnya. Ini juga disebabkan oleh karena kurangnya sumberdaya keuangan, pengalaman, keahlian serta kompetensi yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Sehingga perusahaan-perusahaan yang memiliki sumberdaya keuangan, pengalaman, keahlian dan kompetensi yang dapat mengembangkan pariwisata melalui kenyamanan fasilitas dan infrastruktur penunjang pariwisata yang diberikan kepada wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara. Pada akhirnya, secara subsekuensi perusahaan-perusahaan multinasional sangat dominan didalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan karena mereka memiliki kekuatan untuk mengaturnya.

Kebijakan merupakan konstituen dari sebuah kerangka peraturan yang terdiri dari aturan, hukum, peraturan dan kebijakan pemerintah. Teori kelembagaan menyatakan bahwa komponen utama dari kerangka peraturan adalah institusi politik. Institusi politik menetapkan aturan dan mendefinisikan batas-batas dalam rangka untuk memastikan kestabilan masyarakat. Institusi politik juga menentukan peraturan dan batas-batas untuk investor asing yang juga dapat mempengaruhi perilaku mereka. Karena pemerintah merupakan aktor utama didalam kerangka peraturan sebuah negara, maka pemerintah diharapkan dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil menguntungkan masyarakat. Namun, peran dominan dari investor asing didalam sebuah kerangka kebijakan mengakibatkan masyarakat terpinggirkan dan tidak dapat ikut dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini memungkinkan bagi investor asing untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan mempengaruhi kebijakan agar dapat memberikan perlindungan bisnis yang kuat untuk mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan dalam hal akses kepada kepemilikan lahan, keringanan dan beban pajak yang rendah, ketentuan kredit serta diantara semua insentif lainnya untuk menarik mereka. Investasi asing juga diberikan kemudahan untuk membangun resor skala besar di lahan pertanian utama maupun di situs pesisir. Hal-hal tersebut merupakan bentuk dari pariwisata yang tertutup (*enclave*) dan memiliki dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat lokal. Selain itu, pariwisata yang tertutup (*enclave*) seperti itu akan menghasilkan kemungkinan potensi pengangguran karena setiap saat perusahaan dapat menarik diri dari destinasi yang telah diinvestasikannya.

D. Economic Imperialism

Imperialisme ekonomi terjadi ketika hasil produksi yang disediakan berasal dari investor asing dari negara inti sedangkan negara yang menjadi pinggiran hanya menyediakan bahan baku dan pasar. Sehingga ini mengakibatkan investor atau perusahaan asing terlibat dalam sebuah struktur kerangka ekonomi negara pinggiran. Investasi asing menyediakan kesempatan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung yang dampaknya bisa positif maupun negatif.

Terkait dengan pariwisata, kegiatan ini dapat membuat sebuah pasar yang baru bagi produsen lokal untuk menyediakan barang kebutuhan sehari-hari dalam jumlah besar. Pada akhirnya secara kolektif, pengeluaran pariwisata untuk jasa dan barang serta dampak *multiplier effect* dapat menginduksi pendapatan yang signifikan di negara tuan rumah. Hal tersebut merupakan dampak langsung dan tidak langsung dari adanya kegiatan pariwisata.

Meskipun imperialisme ekonomi menghasilkan keuntungan, akan tetapi ketimpangan ekonomi dianggap sebagai salah satu kelemahan utama. Hal ini karena perusahaan multinasional berinvestasi di negara berkembang yang memiliki kompetisi lemah dan potensi pertumbuhan yang lebih cepat hanya untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi dari investasi mereka. Sehingga sebagian besar keuntungan dari pariwisata dikirim kembali ke negara inti atau aliran mata uang asing kembali lagi ke asalnya melalui repatriasi keuntungan dan impor barang serta jasa. Kebocoran ini merupakan masalah serius untuk negara-negara berkembang. Isu lainnya yaitu munculnya tenaga kerja asing dan perbedaan upah. Tenaga kerja asing ini menghasilkan kebocoran dan mengurangi manfaat ekonomi bagi negara tuan rumah. Meskipun tenaga kerja asing ini minoritas, tetapi mereka menempati sebagian besar posisi manajerial maupun karyawan yang dibayar tinggi. Sedangkan tenaga kerja dari negara tuan rumah dibayar lebih rendah, sehingga ini seperti pada kebanyakan kasus proses produksi padat karya. Selain itu, keuntungan bersih dari kegiatan pariwisata juga cenderung signifikan lebih rendah daripada pengeluaran wisatawan secara kumulatif, yang menandakan adanya kebocoran. (Sinclair-Maragh and Dogan Gursoy, 2004).

E. Cultural Imperialism

Imperialisme budaya terjadi ketika adanya transmisi budaya antara negara inti dengan negara pinggirannya. Transmisi budaya ini dapat dilakukan melalui kekuasaan politik dan ekonomi. Sehingga negara inti secara signifikan dapat mempengaruhi struktur normatif budaya negara pinggiran. Peningkatan pengetahuan tentang budaya individu dari latar belakang yang berbeda dapat menyebabkan pertukaran dan apresiasi pada budaya, warisan dan kepercayaan. Hal ini dapat membangun kebanggaan dan identitas lokal, terutama di kalangan penduduk muda.

Akan tetapi, disisi lain penyebaran nilai-nilai dan kebiasaan budaya negara inti dapat memiliki pengaruh negatif yang signifikan pada budaya lokal. Studi menunjukkan bahwa praktik bisnis perusahaan internasional telah mempengaruhi dunia berkembang ke arah “kebarat-baratan”, yang menyebabkan transformasi sistem nilai, keyakinan, gaya hidup serta pola konsumsi negara tuan rumah. Hal tersebut karena sebagian besar wisatawan internasional yang mengunjungi destinasi wisata datang dari negara-negara barat dan orang-orang lokal yang bekerja di industri pariwisata dilatih untuk menyediakan pelayanan gaya barat dengan meminimalkan gaya tradisional mereka sendiri. Sebagai contoh, karyawan lokal mengadopsi gaya komunikasi dan pakaian gaya barat. Selain itu, pariwisata juga dapat mengakibatkan komersialisasi budaya yang dimasukkan kedalam sebuah operasi bisnis dan menjadi bagian dari pengalaman pariwisata.

II. METODE

Metodologi yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif. Artikel ini bertujuan untuk memahami fenomena perkembangan pariwisata beserta dampaknya pada masyarakat lokal yang berada di wilayah sekitar destinasi wisata dan memahami peran perencanaan serta pengambil keputusan (pemerintah) dalam mengembangkan kegiatan pariwisata pada masa *new-imperialism* atau imperialisme modern. Data dan informasi yang diperoleh dalam artikel ini berdasarkan tinjauan pustaka, *desk study*, dan data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif dengan menggunakan proses induktif, yaitu penelusuran teori umum yang kemudian disandingkan dengan hasil dari *desk study* untuk dihasilkannya sebuah kesimpulan.

Teori yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah teori *new-imperialism* atau imperialisme modern dari para ahli untuk menjelaskan perkembangan serta dampak yang dihasilkan dari adanya kegiatan pariwisata pada masa imperialisme modern saat ini. Selain itu, pendekatan-pendekatan dalam

teori perencanaan, seperti teori keadilan dari Rawl's dan Sen serta tantangan etika akuntabilitas pada perencanaan seperti yang dinyatakan oleh Roy digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana peran perencanaan dalam mengembangkan kegiatan pariwisata di masa *new-imperialisme/ imperialisme* modern saat ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Pariwisata di Borobudur dan Mandalika

Saat ini Borobudur dan Mandalika merupakan salah satu dari sepuluh destinasi pariwisata prioritas yang diarahkan oleh Pemerintah Pusat untuk dikembangkan mulai tahun 2016. Ini adalah salah satu kebijakan Presiden untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian di Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah (Kemenpar, 2016)

Borobudur masuk kedalam salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dengan daya tarik wisata utamanya berupa Kompleks Candi yang masuk kedalam *UNESCO Heritage Sites* serta Candi Prambanan. Kawasan Candi Borobudur termasuk kedalam *World Heritage Site* atau Konservasi Warisan Dunia yang dicetuskan dalam sidang UNESCO ke-17 di Paris pada tanggal 16 November 1972. Kemudian Pemerintah Indonesia meratifikasi melalui Kepres No. 26 Tahun 1989 yang pada selanjutnya Kawasan Candi Borobudur terdaftar dalam *World Heritage List* No. 592 Tahun 1991. Borobudur dikenal dengan produk wisatanya yang berupa wisata budaya dan sejarah. Pada tahun 1981. Candi Borobudur dikelola oleh PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko/ PT TWBC Persero. Wisatawan dapat menuju ke Candi Borobudur melalui Bandara Internasional Achmad Yani dan Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang serta Bandara Adisucipto di Yogyakarta. Amenitas pariwisata yang berada di Candi Borobudur ini berupa hotel, *homestay*, tempat parkir, taman, petunjuk arah, *Telecommunication Information Center*, retail, kuliner, serta toko souvenir. Pada tahun 2012, jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 193.982 orang. Kemudian pada tahun 2013, jumlah wisatawan mancanegara mengalami kenaikan sebesar 33.355 orang, sehingga menjadi 227.337 orang dengan tingkat pertumbuhan kunjungan wisatawan sebesar 17,19 persen. Devisa wisatawan mancanegara sebesar 27.337.000 USD. Untuk mencapai target menarik 2.000.000 wisatawan mancanegara pada tahun 2019, investasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan Borobudur adalah sebesar 1.520 USD, dengan proyeksi devisa yang akan didapatkan sebesar 2.000 juta USD. Target pasar wisata mancanegara Candi Borobudur adalah Negara Malaysia, Taiwan, Singapura, Jepang, USA, Inggris, Hongkong, Belanda, Jerman dan Brunei Darussalam (Kemenpar, 2016).

Sedangkan Mandalika merupakan salah satu dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang ditetapkan melalui PP No. 52 Tahun 2014 dengan fokus utama pengembangan KEK dibidang pariwisata. Daya tarik wisata Mandalika adalah Danau Segara Anak, Puncak Gunung Rinjani, Sumber Air Panas, Lava, Hutan, Air Terjun, Flora dan Fauna, Tenun, Peresean, Gendang Beleq, serta Ngayu-Ngayu. Untuk menuju ke Mandalika, wisatawan mancanegara maupun nusantara dapat melalui jalur udara, darat dan laut. Jalur udara melalui Bandara Internasional di Lombok, jalur laut melalui Pelabuhan Lembar yang juga berada di Lombok. Sedangkan untuk jalur darat dapat melalui Terminal Mandalika yang berada di Mataram. Amenitas pariwisata yang ada di Mandalika saat ini adalah hotel dan restoran. Saat ini Badan Usaha Pembangunan dan pengelola KEK Mandalika adalah PT. *Indonesia Tourism Development Corporation* (ITDC).

Pada tahun 2012, jumlah wisatawan mancanegara ke Mandalika sebesar 121.482 orang. Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2013 sebesar 3.825 orang sehingga menjadi sebesar 125.307 orang, dengan pertumbuhan kunjungan sebesar 3,15 persen. Devisa wisatawan mancanegara sebesar 125.307.00 USD. Untuk mencapai target menarik 1.000.000 wisatawan mancanegara pada tahun 2019, investasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan Mandalika adalah sebesar 3.600 USD, dengan proyeksi devisa yang akan didapatkan sebesar 1.000 juta USD. Target pasar wisata mancanegara Mandalika adalah Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Taiwan, Jepang, Negara Timur Tengah, Eropa, Tiongkok dan USA. Selain wisatawan mancanegara, Mandalika juga memiliki target pasar wisata nusantara. Hal ini merupakan prospek untuk menarik pasar dalam negeri, karena seiring dengan

semakin banyaknya wisatawan nusantara yang melakukan perjalanan wisata. Target pasar wisatawan nusantara berasal dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi (Kemenpar, 2016).

Saat ini pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan kementerian terkait sedang mengembangkan pariwisata di Borobudur dan Mandalika dengan membuat berbagai strategi pengembangan, baik berupa pengembangan dalam bidang infrastruktur dan aksesibilitas serta amenitas pariwisata. Untuk meningkatkan atraksi wisata di Borobudur, pengembangan pariwisata yang dilakukan adalah dengan membuat paket-paket wisata dan perbaikan daya tarik wisata *heritage*. Sedangkan atraksi wisata yang akan ditingkatkan oleh Mandalika adalah *Cultural Village*, Kawasan Konservasi Mangrove, *Fisherman Wharf Festival*, Bau Nyale, dan wisata pantai. Untuk amenitas pariwisata, Mandalika memerlukan fasilitas kesehatan dan keselamatan skala internasional untuk mendukung kegiatan atraksi pantai termasuk peningkatan kebersihan dan sanitasi. Selain itu, Kementerian pariwisata juga membentuk visi dan tujuan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata di masing-masing destinasi wisata. Visi Borobudur adalah *The Capital of Buddhist Heritage in The World*, dengan tujuan menjadikan Borobudur dan sekitarnya sebagai destinasi pariwisata nasional dan internasional yang memiliki kekayaan potensi pariwisata budaya dan religi yang berkelanjutan, dan mampu menarik kunjungan 2 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2019. Sedangkan visi Mandalika adalah *World's Best Halal Tourism and Cruise Destination*, dengan tujuan menjadikan pilihan destinasi pariwisata halal terbaik bagi dunia wisatawan muslim khususnya dan menjadi *entry point* wisata *cruise* dunia di Pulau Lombok yang mampu menarik kunjungan 1 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2019.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan pariwisata di Borobudur dan Mandalika mengalami perbedaan. Borobudur merupakan destinasi pariwisata yang sudah berkembang sejak tahun 80-an, sedangkan Mandalika merupakan KEK yang baru dibentuk pada tahun 2014, sehingga ini berimplikasi pada penerimaan masyarakat lokal terhadap kegiatan pariwisata dan dampak yang dihasilkan oleh kegiatan pariwisata itu sendiri terhadap masyarakat lokal. Penerimaan masyarakat lokal di sekitar wilayah destinasi wisata Candi Borobudur saat ini menunjukkan cenderung yang baik. Hal ini diperkuat dengan adanya penelitian dari Ardiyansyah (2010) yang menyatakan bahwa sebesar 95,7 persen responden yang diteliti setuju Candi Borobudur dijadikan sebagai obyek wisata. Selain itu, 72,3 persen responden menyatakan bahwa mereka mendapatkan keuntungan dari dijadikannya Candi Borobudur sebagai obyek wisata.

Sedangkan di Mandalika, penerimaan dari masyarakat lokal di sekitar wilayah destinasi wisata cenderung agak berbeda. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Kementerian ATR (2015) Hal ini muncul karena adanya permasalahan status lahan dan lahan terlantar yang terjadi baik di dalam kawasan KEK maupun di sekitarnya. Permasalahan-permasalahan tersebut muncul karena adanya kelalaian pemerintah dalam menindaklanjuti lahan terlantar dan kesimpangsiuran kepemilikan lahan masyarakat. Kesimpangsiuran tersebut disebabkan oleh status Hak Guna Bangun dimiliki oleh pihak lain, namun untuk status lahan atas nama masyarakat. Sehingga hal ini berpotensi memunculkan konflik antara pihak pengembang (PT. ITDC), pemerintah dan masyarakat lokal. Permasalahan lahan ini menjadi salah satu faktor utama penghambat belum maksimalnya pembangunan yang dilakukan oleh pihak ITDC. Selain itu, permasalahan ini juga menyebabkan para investor ragu untuk menanamkan modalnya di KEK Mandalika karena masih adanya ketidakjelasan status lahan. Untuk dampak yang diberikan dari adanya kegiatan wisata pada masyarakat lokal di wilayah sekitar destinasi wisata akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

B. Dampak Sosial Ekonomi Serta Sosial-Budaya Terhadap Masyarakat Lokal di Wilayah Sekitar Destinasi Wisata Pada Masa Imperialisme Modern

Dampak akibat adanya kegiatan pariwisata terhadap masyarakat lokal di wilayah sekitar destinasi wisata dalam artikel ini dibagi menjadi dua, yaitu dampak sosial-ekonomi dan dampak sosial-budaya. Menurut Cohen (1984) dalam Pitana (2004), dampak pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi-masyarakat lokal dapat dikategorikan menjadi delapan kelompok besar, yaitu:

1. Dampak terhadap penerimaan devisa;
2. Dampak terhadap pendapatan masyarakat;

3. Dampak terhadap kesempatan kerja;
4. Dampak terhadap harga-harga;
5. Dampak terhadap distribusi manfaat/ keuntungan;
6. Dampak terhadap kepemilikan dan kontrol;
7. Dampak terhadap pembangunan pada umumnya; dan
8. Dampak terhadap pendapatan pemerintah.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya pada latar belakang, hampir semua literatur dan kajian studi lapangan menunjukkan bahwa kegiatan pariwisata mampu memberikan dampak-dampak yang dinilai positif, seperti peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan penerimaan devisa, peningkatan kesempatan kerja dan peluang usaha, peningkatan pendapatan pemerintah dari pajak dan keuntungan badan usaha milik pemerintah, dan lain-lain (Pitana, 2004). Pariwisata juga dapat menghasilkan angka pengganda/ *multiplier effect* yang lebih tinggi melebihi angka pengganda pada berbagai kegiatan ekonomi lainnya.

Akan tetapi, kegiatan pariwisata juga dapat menghasilkan dampak yang negatif. Seperti semakin memburuknya kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat sampai terjadinya 'kebocoran ekonomi' (*ekonomi leakage*) akibat kecilnya muatan lokal yang digunakan dalam kegiatan wisata pada resor-resor/ hotel tertutup (*enclave resort*) yang didominasi oleh modal asing. Sehingga sebagian besar keuntungan dari pariwisata dikirim kembali ke negara inti atau aliran mata uang asing kembali lagi ke asalnya melalui repatriasi keuntungan dan impor barang serta jasa. Kebocoran ini merupakan masalah serius untuk negara-negara berkembang. Hal tersebut menandakan adanya indikasi bahwa kegiatan pariwisata yang dijalankan bersifat *new imperialism/ imperialism* modern dari bentuk imperialism secara ekonomi. Hal ini karena aliran modal investasi yang diberikan kepada negara berkembang melalui fasilitas pariwisata, seperti resor-resor dan hotel tidak terintegrasi dengan barang-barang ataupun jasa lokal yang ada dalam mendukung kegiatannya, melainkan mengimpor dari negara-negara pemilik modal tersebut. Sehingga akumulasi aliran uang dari wisatawan mancanegara kembali lagi ke negaranya. Imperialisme secara ekonomi ini terkait dengan imperialism politik. Hal tersebut disebabkan oleh adanya dominasi perusahaan-perusahaan multinasional pada proses perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mempengaruhi kebijakan agar dapat memberikan perlindungan bisnis yang kuat bagi mereka. Sehingga memungkinkan investor asing untuk mendapatkan keuntungan dalam hal akses kepada kepemilikan lahan, keringanan dan beban pajak yang rendah, ketentuan kredit serta diantara semua insentif lainnya untuk menarik mereka.

Terkait dengan dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan oleh adanya destinasi wisata terhadap masyarakat lokal di Borobudur dan Mandalika didalam artikel ini dilihat dua hal, yaitu dari dampak pendapatan masyarakat dan kesempatan kerja masyarakat lokal. Berdasarkan penelitian Ardiyansyah (2010) mengenai persepsi masyarakat sekitar terhadap pemanfaatan dan kelestarian candi borobudur, menyatakan bahwa terdapat 72,3 persen responden menyatakan bahwa mereka mendapatkan keuntungan dari dijadikannya Candi Borobudur sebagai obyek wisata. Sedangkan sisanya, yaitu 24,8 persen responden menyatakan bahwa mereka tidak mendapatkan keuntungan dari dijadikannya Candi Borobudur sebagai obyek wisata. Persentase tersebut masih cukup besar bila mengingat bahwa seharusnya masyarakat lokal sekitar yang paling diuntungkan dalam pemanfaatan Candi Borobudur sebagai sebuah obyek wisata.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mardianingsih (2003) yang menyatakan bahwa Candi Borobudur mampu memberikan kesempatan kerja dan usaha pada masyarakat lokal melalui berbagai mata pencaharian yang dapat dilakukan di sekitar obyek wisata, seperti berdagang maupun menyediakan jasa seperti fotografer dan kusir andong. Sehingga masyarakat di sekitar Kawasan Candi Borobudur saat ini tidak hanya bergantung pada mata pencaharian pertanian saja untuk kehidupannya. Akan tetapi, dampak sosial-ekonomi masyarakat lokal yang berada di sekitar Kawasan Candi Borobudur ini jangkauannya tidak luas. Hanya desa yang memiliki jarak paling dekatlah, seperti Desa Borobudur yang berada tepat di lokasi obyek wisata yang menerima dampak ekonomi lebih kuat daripada Desa Candirejo, yang berjarak 5-7 km dari obyek wisata Candi Borobudur. Sehingga, ini

menghasilkan korelasi dengan responden yang menjawab bahwa mereka tidak mendapatkan keuntungan dari dijadikannya Candi Borobudur sebagai obyek wisata.

Penelitian lainnya dari Cywinski (2015) yang menyatakan bahwa masyarakat di kawasan sekitar Candi Borobudur dikecualikan dari pembagian keuntungan adanya obyek wisata. Alasannya adalah bahwa dengan dipagarnya kawasan di sekitar candi, maka pergerakan turis hanya didalam kompleks candi saja, yang akibatnya wisatawan tidak perlu sampai melampaui kompleks candi atau mengunjungi wilayah sekitar Candi Borobudur. Hal ini berimplikasi pada rendahnya dampak ekonomi yang dihasilkan oleh Candi Borobudur terhadap wilayah sekitar yang relatif agak jauh dari Candi, seperti Desa Candirejo maupun desa lainnya. Selain itu, wisatawan baik mancanegara maupun lokal juga kebanyakan tidak menginap di dekat candi, melainkan di Kota Yogyakarta yang waktu tempuhnya sekitar 1 jam dari Candi Borobudur. Hal ini karena wisatawan hanya menghabiskan waktu di Candi Borobudur sekitar 3 atau jam perjalanan saja. Akan tetapi, saat ini sudah banyak *homestay* maupun hotel bintang 3 dan 4 yang berlokasi di wilayah sekitar Candi Borobudur, seperti Hotel Saraswati Borobudur, Manohara Hotel, Plataran Borobudur *Resort and Spa*, dan lain-lain. Kebanyakan dari hotel-hotel tersebut merupakan hotel domestik yang kepemilikan modalnya belum diketahui berasal dari dalam atau luar negeri. Hal ini karena kurangnya informasi yang didapatkan. Saat ini Pemerintah telah mempersiapkan anggaran sebesar Rp. 20 Triliun untuk pengembangan kawasan Candi Borobudur. Sebanyak Rp. 10 Triliun akan dibiayai dari APBN, sedangkan Rp. 10 triliunnya lagi akan ditawarkan kepada investor. Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk membangun infrastruktur dasar, seperti jalan, listrik dan penyediaan air serta fasilitas penunjang pariwisata seperti hotel. Pembangunan infrastruktur ini dilakukan untuk mendukung kedatangan wisata asing (Kompas, 2016).

Sedangkan dengan adanya destinasi wisata Mandalika, mayoritas masyarakat lokal yang berada di kawasan sekitar berpendapat bahwa KEK dapat membantu dalam pengembangan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Hal ini karena masyarakat dapat menjadi penjual perdagangan kerajinan khas Lombok di sekitar obyek wisata Mandalika. Akan tetapi, dampak positif yang diterima tidak sebesar dampak negatif yang telah dihasilkan. Hal ini arena munculnya *homestay-homestay* yang berada di sepanjang pantai yang kepemilikannya bukan berasal dari masyarakat lokal.

Selain itu, didalam Kawasan KEK Mandalika telah terdapat satu hotel internasional yang modalnya berasal dari luar negeri, yaitu Novotel yang merupakan sebuah merk hotel berskala menengah milik grup Accor. Dengan dibangunnya Novotel juga mengakibatkan kawasan sepanjang pantai yang mana merupakan lokasi Novotel berada menjadi lebih privat sehingga fenomena *enclave resort* terjadi di KEK Mandalika. Saat ini pemerintah telah menganggarkan anggaran sebesar 3,6 Miliar USD untuk pengembangan pariwisata di Indonesia, dengan anggaran sebesar Rp. 1,8 Triliun berasal dari APBN dan sisanya berasal dari investasi asing. Saat ini, terdapat tiga investor baik asing maupun domestik yang sudah menyampaikan minatnya secara terbuka untuk mengembangkan pariwisata di Mandalika. Pertama, yaitu *Executive Chairman Ecoregions International Niclas Adler* yang berminat untuk menanamkan modalnya sebesar 150 juta USD berupa pengembangan rumah sakit berskala internasional, hotel, dan sarana rekreasi lainnya yang bertema *ecotourism*. Kedua adalah PT. Dharmakusala Waskita Barana yang berkomitmen untuk melakukan pembangunan hotel di KEK Mandalika dengan nilai investasi sebesar 37,5 juta USD. Ketiga adalah Mohammed Hedi Mejai, Direktur Investasi Islamic Development Bank yang berkomitmen untuk membantu pendanaan pengembangan infrastruktur KEK Mandalika sebesar 100 juta USD (bali.bisnis.com, 2016)

Jika melihat dampak negatif sosial-budaya pariwisata terhadap kehidupan masyarakat lokal merupakan sebuah pekerjaan yang sulit, terutama dari segi metodologis. Salah satu kendala yang hampir tidak dapat diatasi adalah banyaknya faktor kontaminasi yang ikut berperan didalam mempengaruhi perubahan yang terjadi, seperti pendidikan, media massa, transportasi, komunikasi, maupun sektor-sektor pembangunan-pembangunan lainnya yang menjadi wahana dalam perubahan sosial-budaya, serta dinamika internal masyarakat itu sendiri (Pitana, 2004). Sehingga didalam melihat pengaruh pariwisata terhadap masyarakat dan kebudayaan harus disadari bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang secara internal terdefensiasi, aktif dan selalu berubah. Maka, pendekatan yang lebih realistik adalah dengan menganggap bahwa pariwisata merupakan pengaruh luar yang kemudian terintegrasi dengan

masyarakat, yang pada akhirnya masyarakat mengalami proses menjadikan pariwisata sebagai bagian dari kebudayaannya atau yang disebut sebagai proses ‘turistikasi’. Sehingga ini yang dinamakan sebagai imperialisme budaya, dimana terjadi ketika adanya transmisi budaya antara negara inti dengan dengan negara pinggirannya yang secara signifikan dapat mempengaruhi struktur normatif budaya negara pinggiran.

Akan tetapi, Sharpley (1994) dalam Pitana (2004) melihat sesuatu yang berbeda terhadap dampak sosial-budaya yang dihasilkan dari kegiatan pariwisata. Dia menyatakan bahwa pariwisata merangsang munculnya komunikasi yang lebih intensif didalam masyarakat lokal. Masyarakat dapat memanfaatan peluang yang diberikan oleh pariwisata dan manfaat ekonomi pariwisata yang dapat digunakan dalam kegiatan pelestarian budaya. Sehingga hal ini secara nyata bahwa pariwisata memberikan kontribusi yang nyata dalam pelestarian bangunan-bangunan bersejarah atau keagamaan. Jika dikaitkan dengan Borobudur, ini sangatlah berkaitan dengan persepsi masyarakat yang berada di sekitar wilayah Candi Borobudur untuk turut serta berperan aktif dalam menjaga kelestarian Candi Borobudur, dimana persepsinya mencapai 91,7 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa minat masyarakat untuk terlibat langsung dalam upaya menjaga kelestarian Candi Borobudur sangatlah besar karena masyarakat sadar bahwa hal itu terkait dengan manfaat ekonomi yang diberikan oleh Candi Borobudur dan sebagai bentuk rasa memiliki terhadap kekayaan lokal (Ardiyansyah, 2010). Hal yang lain berbeda dengan masyarakat di Mandalika yang tetap memelihara kearifan lokalnya, seperti awig-awig sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak terutama dalam berinteraksi dan mengelola sumberdaya alam dan lingkungan.

C. Peran Perencana Dalam Mengembangkan Pariwisata Pada Masa Imperialisme Modern

Dari penjabaran di atas dapat diketahui bahwa saat ini perencanaan merupakan salah satu instrumental logis terhadap akumulasi kapitalis yang terjadi. Hal ini dapat dicontohkan dengan peran perencanaan dalam mempromosikan sebuah kota didalam sebuah sistem global (Rankin, 2009). Karena sistem *new-imperialisme* yang terjadi saat ini, maka menjadikan sebuah dilema untuk seorang perencana dalam merencanakan pengembangan pariwisatanya. Saat ini kebanyakan peran perencana di Indonesia masih sebagai *traditional technicians* yang terpisah dengan politik. Sehingga, perencana tidak terlalu memiliki kekuatan/ *power* didalam pengambilan keputusan. Karena proses pengambilan keputusan terjadi diluar proses perencanaan yang mana perencana jarang terlibat didalamnya. Akan tetapi, jika perencanaan yang pada awalnya seharusnya dapat menyejahterakan masyarakat lokal, tetapi yang ada malah membuat masyarakat lokal semakin sengsara, maka sebenarnya perencana juga terlibat didalamnya. Ini seperti yang dikatakan oleh Roy (2006) sebagai akuntabilitas perencana, yaitu pertanggungjawaban perencana terhadap apa yang direncanakan kepada masyarakat, walaupun bukan perencana yang memutuskan. Tapi setidaknya perencana dapat menjadi “pelayan masyarakat” yang mewakili suara masyarakat sehingga dapat mengarahkan para pemegang keputusan untuk memutuskan sesuai apa yang diinginkan oleh masyarakat. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Rankin (2010) bahwa teori perencanaan yang baik tidak hanya mendengarkan keluhan kaum marjinal, tapi juga mengaitkan institusi perencanaan atau akademisi perencana kedalam politik untuk perubahan sosial. Maka, pada akhirnya pembagian tanggung jawab baru untuk mengambil tindakan publik perlu dilakukan oleh perencana yang pada akhirnya akan mewujudkan ‘perencanaan untuk keadilan’ seperti apa yang telah dikemukakan oleh Sen (Basta, 2016).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat dilihat bahwa bentuk imperialisme secara ekonomi dapat menghasilkan dampak negatif terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat lokal. Dampak tersebut terutama dalam pengembangan pariwisata yang dikelola oleh KEK, seperti yang terjadi di Mandalika, dimana sepanjang kawasan pantai yang merupakan tempat berlokasinya hotel internasional menjadi lebih privat sehingga menimbulkan *enclave*. Selain itu juga terdapat *homestay-homestay* yang kepemilikannya bukan berasal dari masyarakat lokal. Ini dapat berpengaruh bagi kelangsungan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat lokal yang berada di sana sebagai objek yang terkena dampak

langsung dari adanya kegiatan pariwisata. Di satu sisi pariwisata menghasilkan devisa dari wisatawan mancanegara dan pajak yang besar sehingga berdampak bagi pertumbuhan ekonomi negara, tapi disisi lainnya juga masyarakat lokal menjadi korban akibat kurangnya kapabilitas dari masyarakat lokal tersebut untuk masuk kedalam sebuah industri pariwisata.

Sehingga jika kapabilitas tersebut belum ditingkatkan, maka ini akan berbahaya bagi perkembangan pariwisata di Indonesia karena semakin banyaknya aliran uang yang keluar ke negara asal pemberi investasi baik itu dari barang maupun jasa (tenaga kerja) yang diimpor dari negara asalnya. Memang pemberdayaan masyarakat masuk kedalam salah satu strategi pengembangan pariwisata, dan untuk KEK Mandalika sendiri juga ada rencana untuk membangun sekolah pariwisata. Tapi itu saja masih belum cukup, karena diperlukan juga perubahan *mindset* masyarakat lokal untuk dapat meningkatkan kapabilitasnya, seperti menanamkan jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan, menguatkan jejaring antar aktor lokal serta meningkatkan inovasi menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk perencana dalam mengembangkan kegiatan pariwisata.

Sedangkan dampak negatif sosial-ekonomi terhadap masyarakat lokal dari adanya destinasi wisata yang ada di Candi Borobudur berbeda dengan dampak sosial-ekonomi di KEK Mandalika karena saat ini di Borobudur belum terlalu banyak investasi yang ditanamkan sehingga dampak dari adanya imperialisme ekonomi belum signifikan. Tapi ini akan menjadi tantangan juga bagi perencana untuk berhati-hati dalam merencanakan pengembangan pariwisata di Borobudur agar tidak sampai terjadi *enclave* yang akibatnya dapat menyengsarakan masyarakat lokal.

Sehingga, pada saat ini perencana mengalami dilema dalam merencanakan pengembangan pariwisata di Indonesia. Karena kebanyakan perencana di Indonesia saat ini adalah sebagai *traditional technicians* dan bukan seorang pengambil keputusan, sehingga tidak memiliki kekuatan lebih dalam proses pengambilan keputusan yang mana terdapat unsur politis didalamnya. Sehingga saat ini seharusnya perencana harus dapat berperan lebih aktif sebagai *traditional technicians* yang dapat mewakili suara masyarakat sehingga dapat mengarahkan para pemegang keputusan untuk memutuskan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat atau mengaitkan perencanaan kedalam sistem politik. Sehingga ini sejalan dengan ide Sen dalam Basta (2016) untuk menciptakan ‘perencanaan untuk keadilan’ yang mana merencanakan pengembangan pariwisata lebih ke arah pembangunan manusia sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat yang juga seperti apa yang dikatakan Roy (2006), bahwa saat ini perencana-perencana ditantang untuk bagaimana menjelaskan akuntabilitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ardiyansyah, Pangah. 2010. *Persepsi Masyarakat Sekitar Terhadap Pemanfaatan dan Kelestarian Candi Borobudur*. <http://konservasiborobudur.org/download/jurnal/2010.pdf> (Diakses pada tanggal 16 Desember 2016)
- [2] Basta, Claudia. 2016. *From Justice in Planning Toward Planning For Justice: A Capability Approach*. Planning Theory 2016, Vol. 15 (2) 190-212
- [3] Cywinski, Pawel. 2015. *Tourist Neo-Colonialism as an Indication of The Future of Islands. The Example of Borobudur (Central Java)*. Miscellanea Geographica-Regional Studies Development Vol. 19, No. 2, 2015, pp. 21-24, ISSN: 2084:6118, DOI: 10.1515/mgrsd-2015-0011
- [4] Fuchs, Christian. 2010. *Critical Globalization Studies and The New Imperialism*. Critical Sociology Journal 36 (6) 839-867
- [5] Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. 2015. *Laporan Antara Rencana Pengembangan Wilayah di Sekitar KEK Mandalika*
- [6] Maragh, Sinclair Gauntee and Dogan Gursoy. 2015. *Imperialism and Tourism: The Case of Developing Island Countries*. Annals of Tourism Research 50 (2015) 143-158
- [7] Mardyaningsih, Dyah Ita. 2003. *Industri Pariwisata dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial-Ekonomi Masyarakat Lokal (Kasus Dua Desa di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah)*. Bogor: Institut Pertanian Bogor
- [8] Loomba, A. 2005. *Colonialism/ Postcolonialism*. Routledge, London
- [9] Pitana, I Gde. 2004. *Pariwisata dan Kebudayaan Antara Parasitisme dan Simbiosis Mutualisme*. Seminar Internasional Kebudayaan Minangkabau Dan Potensi Etnik Dalam Paradigma Multikultural
- [10] Rankin, Katharine N. 2009. *Critical Development Studies And The Praxis of Planning*. City, Vol. 13, Nos. 2-3, June-September 2009
- [11] Rankin, Katharine N. 2010. *Reflexivity and Post-Colonial Critique: Toward an Ethics of Accountability in Planning Praxis*. Planning Theory 9 (3) 181-199

- [12] Ratman, Dadang Rizki. 2016. Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas 2016-2019. Disampaika pada Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Pariwisata “Akselerasi Pembangunan Kepariwisataan Dalam Rangka Pencapaian Target 12 Juta Wisman dan 260 Juta Wisnus 2016”
- [13] Roy, A. (2006) *Praxis in The Time of Empire* Vol 5 (1): 7-29. London: Sage Publications.
- [14] <http://travel.kompas.com/read/2016/01/31/073947027/Rp.20.Triliun.untuk.Candi.Borobudur>
- [15] <http://bali.bisnis.com/read/20160320/10/58258/investasi-pariwisata-mandalika-dilirik-asing>
- [16] <http://mataram.antaranews.com/berita/31396/ntb-dorong-anggaran-kek-mandalika-di-apbn>
- [17] <http://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita-investasi/investasi-asing-di-sektor-pariwisata-us-158-miliar>
- [18] UNWTO Tourism Highlights, 2016.